



## Dinamika Kesenjangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Kota Medan: Analisis Trend Periode 2021 - 2025

Grestin Analia Br Togatorop<sup>1</sup>, Regita Cahyani Br Karo Sekali<sup>2</sup>, Silvia Putriani<sup>3</sup>, Lokot Muda Harahap<sup>4\*</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Medan, Indonesia

[grestinanalia6@gmail.com](mailto:grestinanalia6@gmail.com)<sup>1</sup>, [regitachyani20@gmail.com](mailto:regitachyani20@gmail.com)<sup>2</sup>, [silviaputriani150704@gmail.com](mailto:silviaputriani150704@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lokotmudahrp@unimed.ac.id](mailto:lokotmudahrp@unimed.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [lokotmudahrp@unimed.ac.id](mailto:lokotmudahrp@unimed.ac.id)

**Abstract.** *This study is motivated by the importance of understanding the dynamics of poverty and income inequality as key indicators of social welfare in the process of regional economic development. As one of the major economic centers in western Indonesia, Medan City has experienced an economic recovery following the COVID-19 pandemic, which potentially affects the socio-economic conditions of its population. This study aims to analyze the development and trend patterns of poverty levels and income inequality, measured by the Gini Ratio, in Medan City during the period 2021–2025. The study employs a quantitative approach using a descriptive method through trend analysis of secondary data obtained from official publications of Statistics Indonesia (BPS). The results show that the poverty rate in Medan City gradually declined from 8.34 percent in 2021 to 7.25 percent in 2025. During the same period, the Gini Ratio also decreased from 0.402 to 0.305, indicating an improvement in the distribution of income among the population. These findings suggest that the economic recovery in Medan City has not only contributed to poverty reduction but has also been accompanied by a decline in income inequality. This condition indicates that regional economic development in Medan City is gradually moving toward more inclusive economic growth.*

**Keywords:** *Economic Trends; Gini Ratio; Inclusive Economic Development; Income Inequality; Poverty.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika kemiskinan dan kesenjangan pendapatan sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Kota Medan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah barat Indonesia mengalami proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta pola tren tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio di Kota Medan selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui analisis tren terhadap data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Medan cenderung mengalami penurunan secara bertahap dari 8,34 persen pada tahun 2021 menjadi 7,25 persen pada tahun 2025. Pada periode yang sama, nilai Gini Ratio juga mengalami penurunan dari 0,402 menjadi 0,305 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi di Kota Medan tidak hanya berdampak pada penurunan kemiskinan, tetapi juga diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

**Kata Kunci:** Gini Ratio; Kemiskinan; Kesenjangan Pendapatan; Pembangunan Ekonomi Inklusif; Tren Ekonomi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Keberhasilan pembangunan ekonomi pada umumnya tercermin melalui dua indikator penting, yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan pendapatan. Khasanah (2021) menyatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan utama di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan berpotensi

menimbulkan ketimpangan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Sebagai salah satu kota metropolitan dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah barat Indonesia, Kota Medan memiliki dinamika ekonomi yang relatif tinggi. Dalam periode 2021 hingga 2025, perekonomian Kota Medan berada pada fase pemulihan setelah terdampak pandemi COVID-19. Pada masa pemulihan tersebut, berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, perhotelan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai kembali mengalami peningkatan aktivitas ekonomi. (Anwar et al., 2025) menyatakan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berpotensi berkontribusi dalam menekan tingkat kemiskinan serta mendorong inklusi ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya proses pemulihan, dinamika pembangunan ekonomi pada periode tersebut tidak terlepas dari tantangan terkait pemerataan kesejahteraan. Penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Dalam beberapa kondisi, tingkat kemiskinan dapat mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah seperti program perlindungan sosial dan peningkatan upah minimum, sementara pada saat yang sama kesenjangan pendapatan justru meningkat karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat dikatakan inklusif apabila terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang diikuti dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan secara simultan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Saleh & Rizkina (2021) menemukan bahwa Rasio Gini memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek di beberapa daerah di Indonesia. Sementara itu, Thesia et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita serta perkembangan sektor UMKM berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis regresi dengan data panel lintas wilayah untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel. Penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika tren kemiskinan dan kesenjangan

pendapatan secara komparatif dalam satu wilayah metropolitan pada periode pemulihan ekonomi pasca-pandemi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika pergerakan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan pada tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan pola tren tingkat kemiskinan serta Rasio Gini di Kota Medan selama periode 2021–2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan sering digunakan sebagai salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Menurut Khasanah (2021), kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan pembangunan manusia.

Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ketika kesempatan kerja terbatas dan tingkat pendidikan masyarakat rendah, maka kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak juga menjadi terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas.

### **Kesenjangan Pendapatan**

Kesenjangan pendapatan merupakan kondisi di mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata sehingga terjadi perbedaan yang cukup besar antara kelompok

masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam ilmu ekonomi pembangunan, kesenjangan pendapatan sering dijadikan sebagai indikator untuk melihat tingkat pemerataan hasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan biasanya diukur menggunakan Rasio Gini, yaitu suatu indeks yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat dengan nilai antara 0 hingga 1. Menurut Saleh & Rizkina (2021), Rasio Gini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah, di mana nilai yang semakin mendekati angka satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya mengalami keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kondisi ini dapat memperlebar jarak kesejahteraan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Apabila kesenjangan pendapatan terus meningkat, maka dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial serta menghambat terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif.

### **Hubungan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan**

Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan merupakan dua permasalahan ekonomi yang sering terjadi secara bersamaan dalam proses pembangunan. Kesenjangan pendapatan dapat memperburuk kondisi kemiskinan apabila sebagian besar pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam kondisi tersebut, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya karena kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi menjadi terbatas. Menurut Saleh & Rizkina (2021), peningkatan kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah, terutama apabila distribusi pendapatan tidak merata di antara kelompok masyarakat.

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki tingkat pendapatan tinggi, maka kelompok masyarakat miskin akan semakin tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

## **Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah. Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Menurut Thesia & Karmini (2022), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan apabila pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara otomatis mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa kondisi, pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan apabila manfaat pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila sektor ekonomi yang berkembang hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat atau membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

## **Dinamika Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan pada Masa Pemulihan Ekonomi**

Perubahan kondisi ekonomi suatu daerah seringkali mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Setelah terjadinya krisis ekonomi atau pandemi, perekonomian biasanya mengalami proses pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dalam periode pemulihan tersebut, beberapa sektor ekonomi dapat mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Menurut Anwar et al. (2025), masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah.

Namun demikian, proses pemulihan ekonomi tidak selalu terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat mungkin dapat dengan cepat kembali memperoleh pendapatan, sementara kelompok lainnya masih menghadapi kesulitan ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan dinamika pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah Analisis Tren (*Trend Analysis*) untuk melihat dinamika pergerakan data secara longitudinal. Metode ini dipilih karena keterbatasan jumlah sampel tahunan ( $N=5$ ) yang tidak memungkinkan untuk dilakukan uji regresi linear secara valid, namun sangat relevan untuk membedah pola pertumbuhan dan arah kebijakan pembangunan di Kota Medan selama periode pengamatan.

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berfokus pada wilayah administratif Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Rentang waktu penelitian mencakup periode 5 tahun, yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Periode ini dipilih untuk menangkap fenomena pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (*time series*) tahunan. Sumber data berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dan BPS Provinsi Sumatera Utara, khususnya laporan "Kota Medan Dalam Angka" dan "Berita Resmi Statistik" tahun 2021–2025.

#### Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari ambiguitas, variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan ( $Y$ )= Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) di Kota Medan.
- b. Kesenjangan Pendapatan/Gini Ratio ( $X$ )= Indeks yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk dengan rentang nilai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka ketimpangan di Kota Medan semakin tinggi.

#### Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dan visualisasi tren.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tren Tingkat Kemiskinan di Kota Medan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Tingkat kemiskinan biasanya diukur berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan dasar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu, analisis mengenai tingkat kemiskinan sangat penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat serta melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan industri. Namun demikian, perkembangan ekonomi tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis tren kemiskinan perlu dilakukan untuk melihat perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah tingkat kemiskinan mengalami peningkatan atau penurunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data tingkat kemiskinan Kota Medan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik selama periode 2021–2025.

**Tabel 1.** Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Medan Tahun 2021–2025.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Laju Pertumbuhan (%)
2021	193,03	8,34	4,12
2022	187,74	8,07	-3,24
2023	187,28	8,00	-0,87
2024	187,04	7,94	-0,75
2025	171,6	7,25	-8,69

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

#### *Rumus Laju Pertumbuhan Kemiskinan*

Untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun digunakan rumus laju pertumbuhan kemiskinan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan (\%)} = \left( \frac{Pt - Pt-1}{Pt-1} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

Pt = Persentase kemiskinan pada tahun ke-t

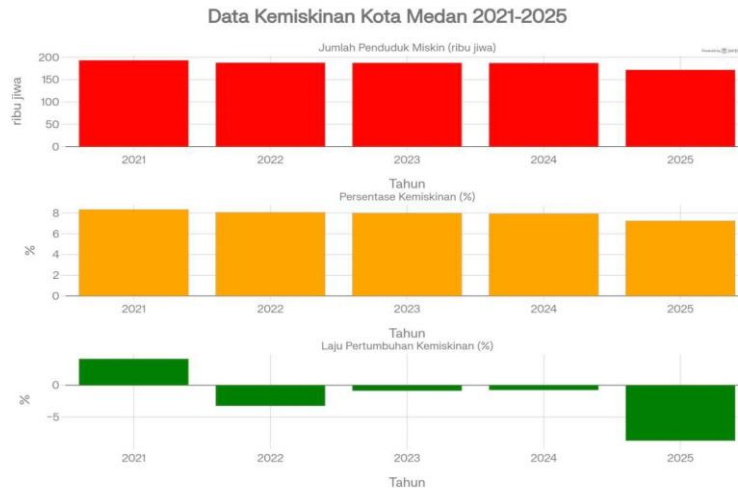
Pt-1 = Persentase kemiskinan pada tahun sebelumnya

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan tingkat kemiskinan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam bentuk persentase. Jika hasil perhitungan bernilai positif, maka tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Medan selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan meningkat menjadi 8,34 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan.

Namun pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen dan kembali menurun menjadi 8,00 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai kembali normal setelah pandemi. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 7,94 persen dan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 7,25 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kota Medan secara bertahap mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi serta berbagai program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Laju pertumbuhan kemiskinan yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai positif pada laju pertumbuhan kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berarti jumlah penduduk miskin bertambah sehingga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pada tahun tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, nilai negatif pada laju pertumbuhan kemiskinan merupakan kondisi yang lebih baik karena menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berhasil dikurangi.



**Gambar 1.** Grafik batang Perkembangan Kemiskinan Kota Medan Tahun 2021 -2025.

Berdasarkan grafik batang perkembangan kemiskinan Kota Medan tahun 2021–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 angka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Pembatasan mobilitas masyarakat serta menurunnya kegiatan perdagangan dan jasa menyebabkan banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian oleh Saputra dkk. yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia karena melemahnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran masyarakat.

Memasuki tahun 2022 hingga 2024 kondisi kemiskinan mulai menunjukkan penurunan secara bertahap. Penurunan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah pemerintah melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Sektor perdagangan, transportasi, dan jasa mulai kembali beroperasi secara normal sehingga meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Menurut penelitian Sasmiharti dan Karyati, pemulihan ekonomi pasca pandemi didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, serta dukungan terhadap UMKM yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, aktivitas perdagangan juga berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian Anggraini dan Fazaalloh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas perdagangan memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara berkembang. Ketika aktivitas perdagangan meningkat, maka

peluang kerja dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data pada grafik, penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2025. Pada tahun tersebut persentase kemiskinan menurun dari 7,94 persen pada tahun 2024 menjadi 7,25 persen pada tahun 2025, atau turun sebesar 0,69 persen poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 dapat dikaitkan dengan semakin stabilnya kondisi ekonomi setelah masa pemulihan pandemi. Aktivitas perdagangan, sektor jasa, transportasi, serta usaha kecil dan menengah kembali meningkat sehingga memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat berkurang.

### **Analisis Dinamika Gini Ratio di Kota Medan**

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio. Indeks ini digunakan untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu wilayah merata atau tidak merata. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 sampai 1, dimana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik, klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Gini Ratio dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah (Gini Ratio < 0,30), ketimpangan sedang (0,30–0,50), dan ketimpangan tinggi (> 0,50). Dengan menggunakan indikator tersebut, analisis Gini Ratio dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah serta melihat apakah pembangunan ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 2.** Perkembangan Gini Ratio Kota Medan Tahun 2021–2025.

<b>Tahun</b>	<b>Gini Ratio</b>	<b>Perubahan Gini Ratio (<math>\Delta G</math>)</b>
2021	0,402	0,021
2022	0,399	-0,003
2023	0,373	-0,026
2024	0,356	-0,017
2025	0,305	-0,051

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Medan

### ***Rumus Perubahan Gini Ratio***

Perubahan Gini Ratio digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat ketimpangan pendapatan dari tahun ke tahun. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\Delta G = G_t - G_{t-1}$$

Keterangan:

$\Delta G$  = Perubahan Gini Ratio

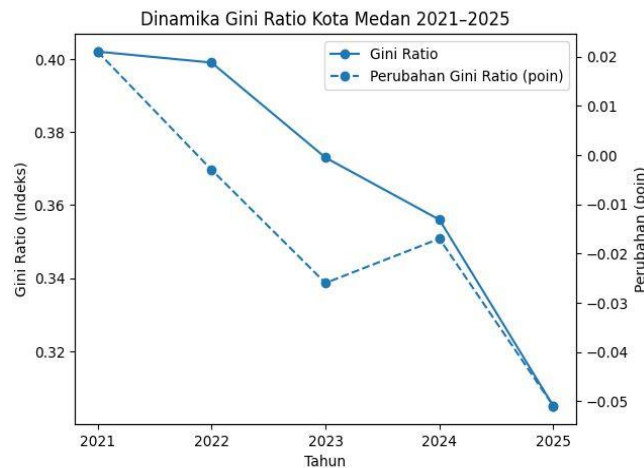
$G_t$  = Nilai Gini Ratio pada tahun ke-t

$G_{t-1}$  = Nilai Gini Ratio pada tahun sebelumnya

Jika nilai  $\Delta G$  bernilai positif, maka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika nilai  $\Delta G$  bernilai negatif, maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa nilai Gini Ratio Kota Medan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2021 nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,402 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Medan berada pada kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2022 nilai Gini Ratio mengalami penurunan menjadi 0,399 dengan perubahan sebesar -0,003. Selanjutnya pada tahun 2023 nilai Gini Ratio kembali menurun menjadi 0,373 dengan perubahan sebesar -0,026. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat mulai mengalami perbaikan secara bertahap.

Pada tahun 2024 nilai Gini Ratio kembali menurun menjadi 0,356 dengan perubahan sebesar -0,017, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 0,305 dengan perubahan sebesar -0,051. Nilai perubahan yang negatif (minus) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata. Sebaliknya, apabila nilai perubahan Gini Ratio bernilai positif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sehingga perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin besar. Oleh karena itu, nilai perubahan Gini Ratio yang negatif seperti yang terjadi pada periode tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Medan.



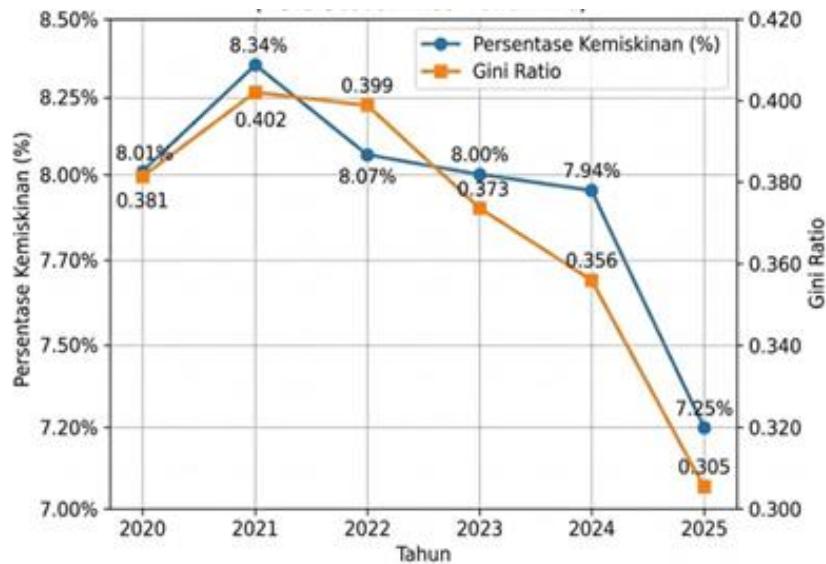
**Gambar 2.** Perkembangan Gini Ratio Kota Medan Tahun 2021–2025.

Berdasarkan grafik garis perkembangan Gini Ratio Kota Medan tahun 2021–2025 dapat dilihat bahwa nilai Gini Ratio menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, berdasarkan nilai Gini Ratio selama periode 2021–2025 dapat disimpulkan bahwa Kota Medan masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, karena nilai Gini Ratio berada pada rentang 0,30 hingga 0,50. Meskipun demikian, tren yang terus menurun menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di Kota Medan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan biasanya berkaitan dengan meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan sektor usaha kecil menengah, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardiani D. R. dan Prabowo P. S., penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan kesempatan kerja dapat memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### **Hubungan Dinamika Kemiskinan dan Kesenjangan di Kota Medan**

Untuk melihat hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kota Medan, data persentase kemiskinan dan nilai Gini Ratio digabungkan dalam satu grafik sehingga dapat memperlihatkan perbandingan perkembangan kedua indikator tersebut selama periode penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi juga diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat.



**Gambar 3.** Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Nilai Gini Ratio di Kota Medan Selama Periode 2021–2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan, diolah penulis (2025).

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,01 persen. Pada tahun 2021 angka kemiskinan meningkat menjadi 8,34 persen, yang menunjukkan dampak tekanan ekonomi pada periode tersebut. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,07 persen, kemudian kembali menurun menjadi 8,00 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 7,94 persen, dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 7,25 persen. Tren ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Medan secara bertahap mengalami perbaikan setelah periode peningkatan sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan nilai Gini Ratio Kota Medan menunjukkan dinamika yang berbeda pada awal periode penelitian. Pada tahun 2020 nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,381, kemudian meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2021. Setelah itu nilai Gini Ratio mulai mengalami penurunan menjadi 0,399 pada tahun 2022, kemudian menurun lebih lanjut menjadi 0,373 pada tahun 2023. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 0,356, dan kembali menurun hingga mencapai 0,305 pada tahun 2025. Penurunan nilai Gini Ratio ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Medan secara bertahap semakin menurun sehingga distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata.

teoritis, apabila tingkat kemiskinan menurun tetapi nilai Gini Ratio meningkat, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi namun distribusi pendapatan belum merata. Sebaliknya, apabila tingkat kemiskinan dan Gini Ratio sama-sama

mengalami penurunan, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berjalan secara lebih inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi tetapi juga mampu memperbaiki pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap data Kota Medan selama periode penelitian, terlihat bahwa setelah tahun 2021 baik tingkat kemiskinan maupun nilai Gini Ratio cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Kota Medan mulai mengarah pada pembangunan yang lebih inklusif, dimana perbaikan kondisi ekonomi tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan tetapi juga diikuti dengan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.

**Analisis Faktor Pendukung Dinamika Sosial-Ekonomi (Analisis Kontekstual)**

Temuan pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya korelasi positif antara penurunan angka kemiskinan (5.1) dan penurunan ketimpangan pendapatan (5.2) di Kota Medan selama periode 2021–2025. Fenomena di mana kedua indikator ini membaik secara bersamaan mengindikasikan bahwa Kota Medan tengah berada pada jalur Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (*Inclusive Growth*). Kondisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh sinergi antara kebijakan pengupahan (sisi pendapatan) dan efektivitas jaring pengaman sosial (sisi pengeluaran).

**Peran Strategis Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Medan**

Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan instrumen utama dalam meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di sektor formal. Selama periode pengamatan, Pemerintah Kota Medan secara konsisten menaikkan ambang batas upah layak bagi pekerja.

**Tabel 3.** Data Upah Minimum Kota (UMK) Medan Periode 2021–2025.

Tahun	Upah Minimum Kota Medan	Kenaikan Nominal (Rp)
2021	Rp3.329.867	-
2022	Rp3.370.645	40.778
2023	Rp3.624.118	253.473
2024	Rp3.769.082	144.964
2025	Rp4.014.072	244.990

Analisis mendalam terhadap data UMK menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2025 terjadi lompatan kenaikan upah yang cukup signifikan. Peningkatan ini berdampak langsung pada dua hal:

- a. Pengentasan Kemiskinan: Kenaikan UMK yang melampaui laju inflasi daerah memastikan rumah tangga pekerja tetap berada di atas Garis Kemiskinan (GK). Hal ini menjelaskan mengapa persentase kemiskinan turun tajam menjadi 7,25% pada tahun 2025.

- b. Redistribusi Pendapatan: Dengan menetapkan standar upah yang lebih tinggi bagi kelompok bawah, jurang pendapatan dengan kelompok menengah-atas dapat dipersempit. Hal ini terkonfirmasi pada Tabel 5.2, di mana Gini Ratio Kota Medan berhasil ditekan hingga ke level 0,305 (kategori ketimpangan rendah) pada akhir periode penelitian.

### ***Struktur Jaring Pengaman Sosial Pemko Medan (2021–2025)***

Selain intervensi melalui pendapatan upah, Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Walikota Bobby Nasution menerapkan strategi perlindungan sosial yang komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan beban pengeluaran rumah tangga miskin (*expenditure reduction*).

a. Sektor Ketahanan Pangan dan Kebutuhan Pokok

Pemko Medan mengintegrasikan bantuan dari pemerintah pusat dengan bantuan lokal untuk menjaga konsumsi pangan masyarakat. Program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) disalurkan secara berkelanjutan hingga 2025. Uniknya, di tingkat lokal, Pemko Medan aktif menyalurkan Bantuan Sembako Beras dan Minyak Goreng tambahan sebagai respon cepat terhadap fluktuasi harga pangan (inflasi). Intervensi ini sangat krusial karena bagi penduduk miskin, lebih dari 60% pendapatan habis digunakan untuk konsumsi pangan.

b. Transformasi Modal Manusia melalui Pendidikan

Untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi (*intergenerational poverty trap*), Pemko Medan melakukan investasi besar pada sektor pendidikan:

- 1) PIP (Program Indonesia Pintar): Memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah.
- 2) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa (2025): Peluncuran bantuan khusus bagi mahasiswa warga Medan dari keluarga tidak mampu pada tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan tenaga kerja ahli dari kalangan bawah. Langkah ini secara jangka panjang akan meratakan distribusi pendapatan (menurunkan Gini Ratio) karena akses pendidikan tinggi tidak lagi menjadi monopoli kelompok kaya.

c. Jaminan Kesehatan dan Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga

Akses kesehatan gratis melalui KIS/BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu di Kota Medan telah menghilangkan risiko "kemiskinan mendadak" akibat biaya pengobatan (*catastrophic spending*). Dengan kesehatan yang terjamin, penduduk miskin tetap dapat produktif bekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas angka kemiskinan di level makro.

### **Sintesis Hubungan: Kebijakan Makro dan Intervensi Mikro**

Hubungan dinamika yang dijelaskan pada bagian 5.3 merupakan hasil dari pertemuan dua arah kebijakan:

- a. Sisi Pendapatan (*Upstream*): Diperkuat melalui kebijakan kenaikan UMK yang konsisten, memberikan ruang bagi masyarakat untuk bergerak naik kelas.
- b. Sisi Pengeluaran (*Downstream*): Diredam melalui Bansos, bantuan pendidikan, dan kesehatan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari kenaikan upah tidak habis hanya untuk kebutuhan dasar, melainkan dapat digunakan untuk tabungan atau modal usaha kecil (pemberdayaan).

Kombinasi ini menjelaskan mengapa pasca-pandemi (2022-2025), Kota Medan tidak hanya mengalami pemulihan ekonomi secara angka (PDRB), tetapi juga pemulihan secara struktur sosial. Penurunan tajam Gini Ratio dari 0,402 (2021) ke 0,305 (2025) adalah bukti otentik bahwa kebijakan di Kota Medan telah berhasil melakukan redistribusi kekayaan secara lebih merata ke lapisan masyarakat terbawah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tren terhadap data Badan Pusat Statistik Kota Medan periode 2021–2025, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Medan cenderung mengalami penurunan secara bertahap setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Persentase kemiskinan menurun dari 8,34 persen pada tahun 2021 menjadi 7,25 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, transportasi, serta meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah melalui program bantuan sosial dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio mengalami tren penurunan dari 0,402 pada tahun 2021 menjadi 0,305 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat di Kota Medan. Secara keseluruhan, dinamika data menunjukkan bahwa setelah tahun 2021 penurunan tingkat kemiskinan diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi di Kota Medan mulai mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun demikian, hasil penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis tren dengan jumlah

data tahunan yang terbatas, sehingga belum dapat menguji hubungan kausal secara statistik antara variabel kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seperti peningkatan kesempatan kerja, pengembangan 62anjan UMKM, serta optimalisasi program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat terus berlanjut. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode data yang lebih 62anjang serta metode analisis yang lebih komprehensif, seperti analisis ekonometrika atau regresi, sehingga hubungan antara kesenjangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan akurat.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Anggraini, M. R., & Fazaalloh, A. M. (2024). Dampak pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional terhadap kemiskinan di negara berkembang pada era pandemi COVID-19. *Journal of Development Economic and Social Studies*.
- Anwar, M., Abrar, H., Siregar, Y. P., & Al Munawar, A. F. (2025). Dampak pembangunan dan pendapatan terhadap kemiskinan dan kesenjangan di Kota Medan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 103–107. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2238>
- Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 52–62.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Kota Medan dalam angka 2023*. BPS Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024). *Kota Medan dalam angka 2024*. BPS Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). *Kota Medan dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (n.d.). *Website resmi BPS Kota Medan*. <https://medankota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator ketimpangan pendapatan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Badan Pusat Statistik.

- Elverda, S. (2024). Analisis pengaruh pariwisata dan keterbukaan perdagangan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-5. *Jurnal Ekuilibrium*.
- Febrianti, P. N., & Suseno, D. A. (2024). Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 112–121.
- Khasanah, L. (2021). Dampak ketimpangan pendapatan, tata kelola pemerintahan, dan korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75–81.
- Rahmawati, A. D., et al. (2023). The response of income inequality to monetary policy shock in Indonesia. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 11(2), 95–104.
- Saleh, M., & Rizkina, A. (2021). Analisis pengaruh gini ratio dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika*, 13(1), 1–4.
- Saputra, M. F., et al. (2023). Perkiraan dampak pandemi COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia. *Journal of Business Economics and Agribusiness*.
- Sasmiharti, J., & Karyati, E. (2024). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020–2021. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Thesia, D. Y., & Karmini, N. L. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(3), 271–280.
- Zulkarnain, A., & Satrianto, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 34–44.